



Hubungan tingkat pendidikan dan pendapatan peserta Non Penerima Bantuan Iuran dengan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan

Fina Indryanti Harahap¹, Sri Bulan Suci Ritonga², Annisa Aulia Rahmi³, Fitriani Pramita Gurning⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Finaharahap01@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

5 Agustus 2023

Disetujui :

15 Agustus 2023

Dipublikasikan :

25 Agustus 2023

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan status ekonomi non PBI dengan ketersediaan membayar iuran BPJS kesehatan yang ada di kabupaten labuhanbatu. Dalam penentuan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengisi kuisioner online berupa google formulir yang disebarakan melalui media sosial pada bulan Juni 2022 dengan kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Adapun hasil penelitian Hubungan Pendapatan dengan Kemauan Peserta Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai p value lebih dari 0,05 ($p = 0,125$). Hubungan Pendidikan dengan Kemauan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai p value kurang dari 0,05 ($p = 0,015$). Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai p value lebih dari 0,05 ($p = 0,334$). Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai p value kurang dari 0,05 ($p = 0,044$).

Kata kunci: Hubungan Pendidikan, Pendapatan, Kepatuhan, Iuran BPJS

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the relationship between the level of education and economic status of non-PBIs and the availability of paying BPJS health contributions in Labuhanbatu district. In determining the sample using simple random sampling with a total of 50 respondents, Data collection was carried out by filling out an online questionnaire in the form of a Google Form distributed via social media in June 2022 for a period of approximately 1 week. The results of the research on the relationship between income and the willingness of participants to pay BPJS Health Premium Contributions had a p value of more than 0.05 ($p = 0.125$). The relationship between education and the willingness to pay the BPJS Health Premium due to a p value of less than 0.05 ($p = 0.015$). The relationship between income and compliance with paying BPJS Health Premium Contributions had a p value of more than 0.05 ($p = 0.334$). The relationship between education level and compliance with paying BPJS Health Premium Contributions had a p value of less than 0.05 ($p = 0.044$).

Keywords : Relationship between Education, Income, Compliance, BPJS Contributions



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan unsur penting dalam kesejahteraan masyarakat, karena merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan dan papan. WHO dalam konstitusinya memaparkan bahwa kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Setiap individu atau masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan baik bagi diri sendiri atau anggota keluarga lainnya, hal ini telah diatur pada pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan upaya penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Lalu pada UU Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang disingkat BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional tersebut adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar kesehatan setiap peserta semakin terpelihara dan kebutuhan dasar kesehatan dapat lebih terlindungi pada peserta yang membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pihak pemerintah yang dilakukan secara nasional berdasarkan pada prinsip asuransi sosial. Peserta yang termasuk dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu setiap orang atau masyarakat termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran (BPJS Kesehatan, 2018). Kepesertaan pada BPJS Kesehatan ini bersifat wajib meskipun individu atau yang bersangkutan telah memiliki jaminan kesehatan yang lain. Terdapat beberapa jenis dalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu peserta yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu menurut data dari Dinas Sosial.

Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) yaitu peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan tidak mampu berdasarkan data Dinas Sosial. Peserta NonPBI dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Perpres No. 111 Tahun 2013 (BPJS Kesehatan, 2018). Berdasarkan Perpres RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang peserta JKN pada kategori PBPU atau mandiri wajib melakukan pembayaran iuran setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh). Namun apabila tanggal tersebut tepat pada hari libur maka iuran tersebut dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Denda keterlambatan yaitu sebanyak 2% dari total iuran tertunggak per bulannya dan penjaminan dihentikan sementara ketika keterlambatan membayar iuran lebih dari 6 (enam) bulan (Perpres RI, 2013).

Jumlah peserta yang terdaftar pada Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) secara nasional per 31 Januari tahun 2020 mencapai 221.471.196 jiwa atau sekitar 82% dari total penduduk Indonesia. Peserta PBI sebanyak 131.784.844 jiwa atau sekitar 59% dan peserta Non-PBI sebanyak 52.029.433 jiwa atau sekitar 23%. Adapun sebanyak 30.548.055 jiwa atau sekitar 58.71% termasuk dalam peserta PBPU (BPJS Kesehatan, 2021). Di propinsi Sumatera Utara jumlah peserta yang sudah terdaftar atau memiliki jaminan kesehatan pada kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2019 yaitu mencapai 4.004.700 jiwa atau sekitar 27.50% sedangkan pada kategori Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) pada tahun 2019 yaitu mencapai 3.339.192 jiwa atau sekitar 22.93% dari total jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 14.562.549 jiwa (BPS Provsu, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat atau peserta dalam membayar iuran, adapun salah satu pendapat yang memaparkan hal tersebut adalah berasal dari penelitian yang dilakukan (Puspita Sari, 2016) bahwa faktor-faktornya antara lain pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, persepsi, motivasi serta kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran. Dalam penelitian kemampuan dan kemauan tidak menjadi variabel yang diteliti hal ini dikarenakan bahwa ketika individu telah menjadi peserta JKN, maka telah dianggap mampu dan mau dalam membayar iuran. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa peserta PBPU di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mereka menyatakan bahwa beberapa yang menjadi faktor kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di daerah Labuhan batu adalah pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan pengetahuan.

Pada daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021 jumlah peserta yang sudah terdaftar dalam kategori PBI yaitu 87.286 jiwa atau sekitar 27.24%, pada kategori Non-PBI yaitu 108.865 jiwa atau sekitar 33.98% dari total jumlah penduduk yaitu 320.362 jiwa. Tahun 2021 sebanyak 38.997 jiwa telah terdaftar menjadi peserta PBPU. Terjadi peningkatan pada kepesertaan PBPU di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini tentu menjadi menarik jika dilihat dari segi pembayaran oleh peserta karena pembayaran iuran JKN merupakan komponen penting untuk mempermudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Belakangan kasus yang paling sering terjadi adalah masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan diri beserta anggota keluarga lainnya menjadi peserta JKN Mandiri atau Non-PBI hanya pada saat ingin berobat atau saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kantor cabang BPJS Kesehatan Kotapinang, hingga pada tahun 2021 telah tercatat total tunggakan oleh peserta PBPU yaitu sebanyak Rp. 18.426.135.580 yang merupakan nilai tunggakan tertinggi saat ini (KC BPJS Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, 2021). Hal ini menandakan bahwa tidak ada hubungan antara besarnya pendapatan dan pendidikan dengan kemauan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Tingkat Pendidikan Dan

Pendapatan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (non PBI) Dengan Kemauan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Di Kabupaten Labuhanbatu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Menurut Creswell metode penelitian kuantitatif adalah metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Desain *cross sectional* atau dikenal juga dengan potong lintang adalah desain penelitian analitik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dimana variabel independen dan dependen diidentifikasi pada satu waktu. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Labuhanbatu sesuai KTP dan merupakan peserta BPJS kategori non PBI. Dalam penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengisi kuisioner online berupa *google formulir* yang disebarakan melalui media sosial pada bulan Juni 2022 dengan kurun waktu kurang lebih 1 minggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Tabel 1. Karakteristik Sampel

Variabel	Frekuensi	Presentasi (%)
Usia		
< 30 tahun	43	86
≥30 Tahun	7	14
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	22	44
Perempuan	28	56
Pendapatan		
Dibawah Rp 500.000	32	64
Rp 500.000-Rp 1.500.000	7	14
Diatas Rp 1.500.000	11	22
Tingkat Pendidikan		
SD,SMP (Rendah)	2	4
SMA, SI/S2 (Tinggi)	48	96
Kelas Perawatan BPJS		
Kelas 1	18	36
Kelas 2	14	28
Kelas 3	18	36
Kemauan Membayar Iuran		
Mau	37	74
Tidak Mau	13	26
Kepatuhan membayar Iuran		
Patuh	33	66
Tidak patuh	17	34

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan peserta non PBI berusia dibawah 30 tahun sebesar 43 responden (86%) dan yang berusia 30 tahun keatas sebanyak 7 orang (14%). Pada Kategori jenis kelamin, responden pada penelitian ini didominasi perempuan sebanyak 28 (56%) dan laki-laki 22(44%) responden. Dilihat dari tingkat pendidikannya, responden dengan pendidikan tinggi lebih banyak 48 (96%) dibanding pendidikan rendah 2 (4%). Ditabel 1 juga memperlihatkan persebaran kelas perawatan yang diambil, pada kelas 1 sebanyak 18 (36%), pada kelas 2 sebanyak 14 (28%), dan dikelas 3 sebanyak 18 (36%) responden. Responden yang memiliki kemauan membayar iuran premi sebanyak 37 responden (74%) sedangkan yang tidak memiliki kemauan untuk membayar iuran premi sebanyak 13 responden (26%). Untuk tingkat kepatuhan peserta membayar iuran premi 33 (66%) responden pada kategori patuh (selalu membayar tiap bulannya) dan 17 (34%) responden pada kategori tidak patuh (tidak rutin membayar, ada tunggakan).

Analisis Bivariat

Tabel 2 Analisis Hubungan Pendapatan dengan Kemauan Peserta Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu

Variabel Independen	Kemauan Membayar				Total	P	
	Mau		Tidak				
	N	%	N	%			
Dibawah Rp 500.000	25	50	7	14	32	64	0,125
Rp 500.000 - Rp 1.500.000	4	16	3	6	7	14	
Diatas Rp 1.500.000	2	4	9	18	11	22	

Pada tabel 2 menunjukkan tidak ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan kemauan membayar Iuran Premi BPJS = Kesehatan setiap bulannya, ditunjukkan dengan nilai *p value* lebih dari 0,05 ($p = 0,125$).

Tabel 3 Analisis Hubungan Pendidikan dengan Kemauan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu

Variabel Independen	Kemauan Membayar				Total	P	
	Mau		Tidak				
	N	%	N	%			
SD, SMP (Rendah)	0	0	2	4	2	4	0,015
SMA, SI/S2 (Tinggi)	37	74	11	22	48	96	

Pada tabel 3 menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemauan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya, ditunjukkan dengan nilai *p value* kurang dari 0,05 ($p = 0,015$).

Tabel 4 Analisis Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu

Variabel Independen	Kepatuhan Membayar				Total	P	
	Patuh		Tidak				
	N	%	N	%			
Dibawah Rp 500.000	23	46	9	14	32	64	0,334
Rp 500.000 - Rp 1.500.000	3	6	4	8	7	14	
Diatas Rp 1.500.000	7	14	4	8	11	22	

Pada tabel 4 menunjukkan tidak ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan kepatuhan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya, ditunjukkan dengan nilai *p value* lebih dari 0,05 ($p = 0,334$).

Tabel 5. Analisis Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu

Variabel Independen	Kepatuhan Membayar				Total	P	
	Patuh		Tidak				
	N	%	N	%			
SD, SMP (Rendah)	0	0	2	4	2	4	0,044
SMA, SI/S2 (Tinggi)	33	66	15	30	48	96	

Pada tabel 5 menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya, ditunjukkan dengan nilai *p value* kurang dari 0,05 ($p = 0,044$).

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kabupaten labuhanbatu bahwa Hubungan Pendapatan dengan Kemauan Peserta Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai *p value* lebih dari 0,05 ($p = 0,125$) menunjukkan tidak ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan kemauan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya. peneliti menduga bahwa pendapatan keluarga mempunyai kriteria yang rendah /memang tidak mencukupi sehingga kemauan dalam membayar iuran premi BPJS tidak berhubungan terhadap pendapatan mereka. Kemauan dalam membayar iuran sama halnya dengan mampu membayar. Oleh sebab itu pendapatan yang rendah akan membuat masyarakat rendah pula keteraturan dalam membayar iuran BPJS. Hubungan Pendidikan dengan Kemauan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai *p value* kurang dari 0,05 ($p = 0,015$) 3 menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemauan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya. Hal ini karena Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap WTP seseorang karena pendidikan yang lebih tinggi cenderung untuk meningkatkan kesadaran status kesehatan dan konsekuensinya untuk menggunakan pelayanan kesehatan (Rose & Dewi, 2015).

Hubungan Pendapatan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai *p value* lebih dari 0,05 ($p = 0,334$) menunjukkan tidak ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan kepatuhan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya. hal ini di dukung oleh penelitian Nawirah Hasan, dkk (2020) menyatakan bahwa pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi dan membayar iuran. Pendapatan yang rendah mampu menurunkan keteraturan masyarakat dalam membayar iuran BPJS karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak ada alokasi pendapatan yang digunakan peserta untuk membayar iuran tersebut. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai *p value* kurang dari 0,05 ($p = 0,044$) menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya. Hal ini didukung oleh penelitian Irfan Helmi Nugroho (April 2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran seseorang terhadap tindakan perencanaan dan pengendalian risiko yang tidak pasti pada masa depan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang mampu meningkatkan pola pikir, mengubah sikap, dan tata laku seseorang. Pendidikan salah satu faktor predisposing seseorang dalam mengakses pelayanan kesehatan (Lawrence Green)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kasus yang paling sering terjadi adalah masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan diri beserta anggota keluarga lainnya menjadi peserta JKN Mandiri atau Non-PBI hanya -- pada saat ingin berobat atau saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Adapun berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kantor cabang BPJS Kesehatan Kotapinang, hingga pada tahun 2021 telah tercatat total tunggakan oleh peserta PBPU yaitu sebanyak Rp. 18.426.135.580 yang merupakan nilai tunggakan tertinggi saat ini (KC BPJS Kesehatan Kotapinang, 2021). Hubungan Pendapatan dengan Kemauan Peserta Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai *p value* lebih dari 0,05 ($p = 0,125$) menunjukkan tidak ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan kemauan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya. Hubungan Pendidikan dengan Kemauan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan dengan nilai *p value* kurang dari 0,05 ($p = 0,015$) 3 menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemauan membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS, 2014. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Muhammadiyah Public Health Journal Vol. 1 No.2 Tahun 2021 E-ISSN : 2723-4266 Website : <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MPHJ>
Muhammadiyah Public Health Journal | 137 Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Kesehatan

- Chareunisa Ar, 2017. Kepatuhan Membayar dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Mandiri di RSUD Haji Kota Makassar Tahun 2017 Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Fildzah, S., (2016). Wilingnes To Pay Fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kota Banda Aceh. Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.
- Irfan Helmi Nugroho (April 2021) “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar JKN Pada Pekerja Informasi Di Kulon Progo”
https://www.researchgate.net/publication/356169094_Analisis_Faktor_Yang_Mempengaruhi_Kemauan_Membayar_JKN_Pada_Pekerja_Informal_Di_Kulon_Progo
- Jannah, L. M. (2019). Metode penelitian kuantitatif.
- Mardika, Ditta, Faktor Peredisposisi Pendukung dan Pendorong yang Mempengaruhi Perilaku Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBPU di Pacitan 2018. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulya.
- Nawirah Hasan, dkk (sept 2020) “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Tamamaung”
<https://media.neliti.com/media/publications/340556-faktor-yang-berhubungan-dengan-kepatuhan-49b642db.pdf>
- Notoatmodjo, S. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta:Rineka Cipta
- Putri, E.A., 2014. Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Kota terbit : CV Komunitas Pejaten Mediatama
- Ranti, Efrriyani (2017) Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Kelurahan Lubuk Buaya Tahun 2017. Diploma thesis, Universitas Andalas
- Rosmanely, St, 2018. Studi Ketidapatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah Di Kelurahan Parang Tambung Kec.Tamalate. Skripsi. Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar